

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Desember 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **711721**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **652.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 152.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **87.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
2. MOTOR, SUPRA X 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, SUPRA X 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **13.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.525.383****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **754.525.383****III. HUTANG** Rp. **370.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **384.525.383**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.